



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSUD DR. MOEWARDI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YASIP KHASANI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR KEUANGAN
3. NHK : 741816

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.524.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m²/226 m² di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 565.000.000
2. Tanah Seluas 1427 m² di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 642.150.000
3. Tanah Seluas 640 m² di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 960.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m²/68 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 487.350.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m²/138 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.870.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 755.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV TYPE SE Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. MOTOR, VESPA PRIMAVERA 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. MOBIL, TOYOTA LANDCRUISER PRADO TX Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



6. MOBIL, TOYOTA HARRIER 3.0 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000
7. MOBIL, MERCEDEZ BENZ W124 230 E MT Tahun 1993, HASIL
SENDIRI Rp. 48.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 86.955.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 223.928.089

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.590.883.089

III. HUTANG Rp. 1.225.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.365.883.089

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.